

RINGKASAN

Laporan Akhir *Research centre for conflict and policy (RCCP)* Fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Januari, 2015. Kajian Evaluasi Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi UU 6/2014 Tentang Desa. Ketua: Dr. Wilopo, M.AB; Anggota: Dr. Abdullah Said, M.Si; Drs.Achmad Husaeni, MAB; Drs. M. Judi Mukzam, M,Si; Y. Mayowan, S.Sos, MAB; Andy Kurniawan, S.AP, M. AP.

Penelitian ini dilakukan dengan dasar penelitian tentang evaluasi kesiapan pemerintah desa dalam implemetasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di Jawa Timur. Dengan empat (4) daerah sampel Kabupaten dipilih yaitu Kabupaten Blitar, Gresik, Banyuwangi dan Sumenep. Tujuan dari penelitian ini tentang kesiapan desa yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yang dilihat berdasarkan indeks kesiapan. Kedua, mengetahui rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam menuju desa mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pngumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, statistik deskriptif, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman. Indicator yang digunakan dalam merumuskan kesiapan pemerintah desa adalah pertama, dimensi konseptual yang terdiri dari kemandirian dalam pengelolaan pembangunan, kemandirian dalam pelayanan dasar, kemandirian dalam pemerintah desa, kemandirian dalam lembaga kemasyarakatan, kemandirian dalam pemberdayaan warga. Kedua, kapasitas pemerintah desa yang terdiri dari organisasi dan tata kerja, aparatur pemerintah desa, intervensi pemerintah Kab/ Kota, Partisipasi masyarakat, ketiga dimensi konteks legal terdiri dari dasar hukum yang menjadi turunan UU Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) rata-rata nilai skor indeks kesiapan pemerintah desa di Kabupaten Blitar, Gresik, Sumenep dan Banyuwangi SIAP dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dimensi dengan skor tertinggi daerah sampel jawa timur adalah dimensi B yaitu berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa, posisi kedua adalah dimensi A yaitu berkaitan dengan konseptual, dan yang terendah adalah konteks legal. (3) rekomendasi kebijakan cenderung pada pendidikan dan pelatihan tentang desa dalam rangka akselerasi penguasaan konteks legal pengelolaan desa oleh perangkat desa

Kata Kunci: Kesiapan Pemerintah Desa, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indeks Kesiapan Desa